

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DAGING**

**HEWAN BURUAN**

**(Studi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**Nama : Sandriansyah  
NPM : 1421030337  
Jurusan : Muamalah**



**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DAGING**

**HEWAN BURUAN**

**(Studi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**Nama : Sandriansyah**

**NPM : 1421030337**

**Jurusan : Muamalah**



**Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 2018**

**ABSTRAK**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DAGING  
HEWAN BURUAN**

Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya antara lain adalah jual beli. Perkembangan zaman serta kebutuhan manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu membuat manusia dituntut untuk memanfaatkan apapun yang ada di bumi untuk dijadikan sumber ekonomi, salah satunya adalah jual beli daging hewan buruan. Dalam hal ini banyak sekali orang yang tidak mengetahui tata cara bertransaksi jual beli yang benar sesuai dengan prinsip atau ajaran agama Islam. Kepedulian masyarakat yang sangat kurang terhadap hewan, memberikan keleluasaan kepada penjual untuk memperjual belikannya. Islam telah memberikan aturan dasar yang jelas dan tegas, seperti yang diungkapkan fuqoha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli daging hewan buruan di desa Jagaraga dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli daging hewan buruan di desa Jagaraga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai praktik jual beli daging hewan buruan yang dilakukan oleh pemburu di desa Jagaraga ditinjau dari perspektif hukum Islam sehingga dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan khususnya hukum Islam, serta memberikan sumbangsi terhadap masyarakat mengenai pentingnya tentang sebuah kejelasan jual beli daging hewan buruan.

Penelitian ini adalah penelitian jenis *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dalam buku Metode Penelitian mengemukakan bahwa penelitian analisa merupakan penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Maksud dari metode deskriptif yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli daging hewan buruan yang dilaksanakan tidak memenuhi ketentuan hukum jual beli, dalam hal ini mengenai objeknya (*ma'qud alaih*) karena sebagian besar yang diperjual belikan adalah daging hewan yang dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta dalam ayat-ayat Al Qur'an, hadits, ketetapan para Ulama, dan Fatwa MUI No.04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem di Indonesia yang menjelaskan dan menegaskan larangan tersebut. Maka jual beli daging hewan buruan dalam lingkup hewan yang dilindungi menurut tinjauan hukum Islamnya baik zat maupun sifatnya adalah haram.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp.Fax. (0721)703289 Bandar Lampung 35131

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Sandriansyah

NPM : 1421030337

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan**

**Buruan (Studi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau**

**Kabupaten Lampung Barat)**

**MENYETUJUI**

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Erina Pane, S.H., M. Hum.**

**NIP. 197005022000032001**

**Drs. H. Irwantoni, M. Hum**

**NIP. 196010211991031003**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Dr. H. A. Khumaldi Ja'far, S. Ag., M.H**

**NIP. 197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp. Fax. (0721)703289 Bandar Lampung 35131

**PENGESAHAN**

**Skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan (Studi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat), disusun oleh Sandriansyah Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 21 Juni 2018.**

**Ketua : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.** (.....)

**Sekretaris : Muslim, M.H.I.** (.....)

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si.** (.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.** (.....)



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Alamsyah, S. Ag. M. Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah ke-pada Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S Al A’raf : 56)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Al Qur'an Terjemah Al-Ikhlash, Q.S Al-A'raf Ayat 56, hlm. 157.

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karya kecilku untuk orang-orang terkasih yaitu:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda dan Ibunda (yang selalu ada dihatiku) yang tidak henti-hentinya berdoa disetiap sujudnya demi kesuksesan dan keberhasilanku. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan umur dan rizki kepada mereka berdua. Aamiin
2. Untuk saudaraku tercinta: kak Ervan Sairi, mbak Zanti Yarni, mbak Rofidatul Hasnia, dan Adikku Sandra Novandi yang selalu memberikan penulis semangat untuk mencapai cita-cita.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.





## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan dari sebuah keluarga sederhana yang Alhamdulillah berpijak pada ajaran Islam, dari kedua orang tua yang bernama Zulkirom dan Kurziah, aku hidup dari pemberian rizki Allah melalui kedua orang tuaku sosok petani yang bijak yang bermukim di Desa Jagaraga, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat dengan penuh ketentraman, kesejukan, serta terkenal keasriannya.

Aku lahir 31 Agustus 1995 di sebuah desa yang biasa dikatakan Pekon Jagaraga, pada masa kecil sampai beranjak remaja pendidikan formal yang kudapat sangat cukup, begitupun pendidikan informal dari orang tuaku kurasakan sekali dengan tegas dan penuh kasih sayang, nilai-nilai religius masuk dalam diriku.

Pendidikan formalku bermula dari dasar yaitu SD N 1 Jagaraga Kecamatan Sukau berakhir pada tahun 2008, dan berlanjut pada sekolah menengah pertama berada di MTS N 1 Warkuk Ranau Selatan yang berakhir pada tahun 2011, dan berlanjut pada sekolah menengah atas yaitu SMA N 1 Sukau Kabupaten Lampung Barat yang berakhir pada tahun 2014. Atas arahan, dorongan serta motivasi dari kedua orang tua, aku melanjutkan pendidikan ke UIN Raden Intan Lampung pada fakultas Syariah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam). Di UIN inilah aku mendapatkan suatu anugerah berupa ilmu pengetahuan dan disini pula aku dapat mengetahui bagaimana sosok hamba Allah harus berjihad dalam kehidupan sehari-hari dan menempuh suatu kemenangan yang dinanti-nantikan setiap umat Islam.



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan limpahan rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TENTANG JUAL BELI DAGING HEWAN BURUAN”** yang menjadi suatu persayaratan untuk menyelesaikan pendidikan tingkat strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, selaku Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dalam penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan keterbatasan banyak dihadapi oleh penulis mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyelesaian, namun hambatan dan permasalahan dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya selama ini membimbing penulis, mudah-mudahan dengan skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Amiin Yaa Rabbal Alamiin.

Dalam mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu patut diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada kedua orang tua, Ayahanda **Zulkirom** dan Ibunda **Kurziah** tercinta, yang telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga menjadi manusia yang lebih dewasa, dan ucapan terima kasih kepada segenap keluarga besar yang selama ini memberikan support dan nasehat yang tiada hentinya. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Bapak H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H selaku ketua jurusan Muamalah yang senantiasa mengarahkan mahasiswa dalam proses pengajaran yang baik.
4. Ibu Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M. Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Irwantoni. M. Hum selaku pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para tenaga edukatif dan tenaga administratif dilingkungan UIN Raden Intan Lampung.
6. Spesial untuk seseorang yang telah menemani dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini (Maratul Qiftiyah, S.Pd), semoga dia tidak hanya menemani dalam mengerjakan skripsi ini saja tetapi penulis berdoa semoga dia juga yang akan menemani hidup penulis sebagai pendamping hidup kelak, Aamiin.
7. Tutor tahsin Kak Jevri dan Kak Madyani.
8. Sahabat-sahabatku, Ando, Edwar, Ari, Sulton, Faisol, Wiwid, Budi, Rohim, Igam, Bagus, Budi dan Hardi,
9. Kepada teman-teman KKN kelompok 67.
10. Kepada seluruh kader UKM BAPINDA.
11. Kepada teman-teman angkatan 2014, terkhusus untuk jurusan Muamalah A.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi dapat bermanfaat khususnya untuk penulis tersendiri dan umumnya pembaca sekalian. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, keterbatasan yang ada pada penulis, tentunya hal tersebut sangat

mewarnai berbagai dari isi tulisan ini, untuk itu saran dan perbaikan dari manapun datangnya diharapkan demi kebaikan bersama.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 2018

Sandriansyah  
NPM. 1421030337





## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Hukum Islam Tentang Jual Beli .....	15
1. Pengertian Jual Beli .....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Rukun Syarat Jual Beli.....	24
4. Macam-Macam Jual Beli .....	38
5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam .....	42
B. Hukum Islam Tentang Hewan Buruan .....	44
1. Pengertian Berburu.....	44
2. Dasar Hukum .....	45
3. Syarat-Syarat Berburu.....	50
4. Alat-alat yang digunakan untuk Berburu .....	53
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Desa Jagaraga Kabupaten Lampung Barat .....	55
1. Sejarah Berdirinya Desa Jagaraga .....	55
2. Keadaan Demografis Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.....	58
B. Cara Pelaksanaan Berburu di Desa Jagaraga.....	65
C. Jenis Hewan yang di Buru di Desa Jagaraga .....	66
D. Jual Beli Daging Hewan Buruan .....	66
E. Pelaksanaan Undang-Undang No. 05 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	67

F. Pelaksanaan Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem .....	69
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>72</b>
A. Pelaksanaan Jual Beli Daging Hewan Buruan di Desa Jagaraga .....	72
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Blanko Kosnsultasi**

**Panduan Wawancara**

**Surat Permohonan Izin Riset**

**Surat Rekomendasi Penelitian**

**Peraturan Pemerintah**

**Fatwa MUI**





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan” (Studi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat), adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.<sup>2</sup> Jual Beli adalah menurut kamus Bahasa Arab adalah “*al-bait*” yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bait* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *Asy-syra* (beli). Dengan demikian kata *al-bait* berarti jual dan sekaligus juga berarti beli.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 17.

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya, 1997), hlm. 56.

Menurut hukum Islam menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sedangkan menurut Ulama Hanaffiyah Jual Beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (dibolehkan).<sup>4</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>5</sup>

Dalam Fiqih Sunnah, jual beli sendiri adalah tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang dilakukan mau sama mau atau sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Menurut fiqih sunnah, hal ini boleh dilakukan asalkan masih dalam koridor syariat. Seperti harta dan barang yang dijual belikan adalah halal, bukan benda haram, atau asalnya dari jalan yang haram.

Daging adalah otot hewan yang tersusun dari serat-serat yang sangat kecil, masing-masing berupa sel memanjang yang disatukan oleh jaringan ikat, membentuk berkas ikatan yang pada kebanyakan daging jelas kelihatan lemak pembuluh darah dan urat syaraf. Bila potongan daging diamati secara teliti maka tampak dengan jelas bahwa daging terdiri atas tenunan yang terdiri atas air, protein, tenunan lemak, dan potongan tulang. Daging merupakan hasil

---

<sup>4</sup> Rachmad, Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

pemotongan ternak yang telah melalui proses rigormortis, dalam proses rigormortis tersebut otot akan mengalami kehilangan glikogen dan mengakibatkan otot menjadi kaku, setelah itu enzim-enzim proteolitik pada daging akan bekerja dalam memperbaiki keempukan. Sedangkan hewan buruan adalah binatang yang diburu atau dikejar untuk ditangkap.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Jagaraga.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah:

### **1. Alasan Objektif**

Melihat perkembangan zaman yang semakin maju dan persoalan Hukum Islam pun banyak juga terjadi dilingkungan masyarakat. Khususnya yaitu membahas tentang muamalah, sehingga perlu memahami benar sistem bermuamalah pada zaman sekarang. Lebih spesifiknya pada pelaku jual beli dengan objeknya daging hewan buruan.

### **2. Alasan Subjektif**

Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

---

<sup>6</sup>*Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hlm. 159.



### C. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, dalam menjalani kehidupannya manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, baik pangan, sandang, maupun papan. Namun, manusia menyadari akan kemampuannya yang tidak mungkin mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melakukan hubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, secara sadar ataupun tidak, akan membutuhkan orang lain. Berkenaan dengan hal tersebut, Aristoteles (Filsuf Yunani) menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk bermasyarakat. Disadari atau tidak manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>7</sup> Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai aturan-aturan (hukum) yang dipergunakan untuk mengatur manusia-manusia itu sendiri dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial, yang dalam Islam sendiri dikenal dengan istilah muamalah.<sup>8</sup>

Islam juga memberikan tuntutan supaya pintu perkembangan zaman itu jangan sampai menimbulkan kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada orang lain, dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memberikan mudorotnya kepada orang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>9</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam Indonesia*, (Yogyakarta: P. LKIS Printing Cemerlang, 2013), hlm. 41.

Salah satu muamalah yang disyariatkan Allah SWT adalah jual beli. Agama Islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, seperti yang telah diungkapkan fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Seorang muslim, individu maupun kelompok, dalam melakukan aktivitas bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan (*profit*) sebanyak-banyaknya, namun disisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak memiliki kebebasan secara mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Oleh karena itu, dalam praktiknya jual beli harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah tunjukkan kepada manusia dan satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun yang dimaksud jual beli ialah jual beli yang berlandaskan syari'at Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lain yang dapat menyebabkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain.

Kegiatan jual beli, Islam juga selalu memperhatikan berbagai maslahat dan menghilangkan segala bentuk kemudharatan. Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan cukup pesat, apalagi ditinjau dari objek jual beli (*ma'qud 'alaih*). Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka. Kaidah hukum Islam, pada dasarnya perjanjian aqad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan.

Kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka manusia mencoba memutar otak dengan cara mendapatkan penghasilan dengan modal sedikit namun dapat menghasilkan uang yang banyak. Kondisi seperti ini ditambah dengan persaingan yang kompetitif, membuat manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan agar hasilnya dapat diperjualbelikan, tanpa melihat dampak negatifnya bagi lingkungan maupun bagi keseimbangan ekosistem bumi. Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, sebagai manusia yang berakhlak berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya.

Meskipun kaya, Indonesia juga dikenal sebagai Negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang kemudian satwa tersebut menjadi langka adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar atau hewan buruan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia.

Dalam Islam jual beli diharamkan hukumnya serta dibenarkan agama, asal memenuhi syarat serta rukun-rukunnya. demikian hukum ini telah disepakati oleh para ahli ijma' (ulama mujtahidin). Sudah ditegaskan di dalam Al Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal,<sup>10</sup> sedangkan jual beli yang mengandung ketidak jelasan itu dilarang. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam aqad jual beli terdiri dari aqidain (dua orang yang berakat), mahallul aqad (tempat aqad), maudlu'ul aqad, dan rukun-rukun aqad.

---

<sup>10</sup> T.M Hasbib Ash Shidiqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), cet ke 2, hlm. 328.



Sementara dipandang dari fiqih muamalah, jual beli sebagai bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al Qur'an, As Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan tolong menolong sesama manusia.<sup>11</sup>

Usaha apapun yang dilakukan pasti akan melibatkan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula dalam memenuhi kebutuhannya, bermacam ragam upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah itu dengan cara berdagang, bertani, buruh ataupun yang lainnya, seperti halnya berburu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Ma'idah ayat 4 yaitu:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ  
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ  
عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝١٢

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu[399]. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu[400], dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)[401]. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya"

Berdasarkan keterangan ini, maka jelaslah bahwa berburu diperbolehkan, hanya saja kemudian timbul pertanyaan, bagaimana binatang buruan itu

---

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cet ke 1, hlm. 22.

<sup>12</sup> *Al Qur'an dan Terjemah Al-Ikhlâs*.

didapatkan oleh pemburu. Dalam Hukum Islam telah diatur tata cara berburu dengan syarat-syarat:

1. Dalam masalah berburu, disyariatkan bahwa si pemburu adalah orang Islam atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani).
2. Dilakukan dengan niat untuk berburu, tidak hanya sekedar bermain-main.
3. Tidak dilakukan pada waktu sedang berihram (berpakaian ihram dalam pelaksanaan ibadah haji), karena ketika itu diharamkan berburu.
4. Membaca Bismillah ketika akan melakukannya.
5. Apabila menggunakan hewan pemburu seperti anjing, sebutlah nama Allah waktu melepaskannya.
6. Disyariatkan menggunakan alat berburu yang tajam yang apabila mengenai hewan buruan tidak akan menyiksa hewan buruan itu.

Sedangkan tata cara berburu yang dilakukan oleh pemburu di desa Jagaraga adalah berburu secara berkelompok, mereka dibekali oleh alat berburu tombak dan ada juga senapan angin yang dijadikan sebagai alat untuk berburu dan mereka juga menggunakan hewan pemburu untuk menangkap hewan buruannya, yaitu anjing pemburu yang sudah dilatih oleh mereka untuk berburu hewan buruan.

Pembahasan jual beli daging hewan buruan ini menarik untuk dikaji dikarenakan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat di desa Jagaraga, maka perlu diadakan penelitian terhadap tata cara mereka dalam menangkap hewan buruan tersebut, sehingga masyarakat nantinya akan mengetahui dan lebih memperhatikan tentang kejelasan daging

hewan buruan yang mereka beli. Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang penangkapan dan praktik bisnis yang diterapkan oleh pelaku jual beli daging hewan buruan, dengan menekankan pada aqad jual beli serta transaksi jual beli daging hewan buruan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau belum. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan. Diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan transaksi jual beli daging hewan buruan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian itu dapat penulis formulasikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli daging hewan buruan di desa Jagaraga?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam tentang jual beli daging hewan buruan di desa Jagaraga?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui tata cara penangkapan hewan buruan yang diperbolehkan dalam Islam sehingga dagingnya halal untuk dikonsumsi.
- b. Untuk mengetahui aqad jual beli dan syarat sahnya transaksi jual beli daging hewan buruan dalam Hukum Islam.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai aqad jual beli daging hewan buruan dalam hukum Islam serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang daging hewan buruan seperti apa yang diperbolehkan dikonsumsi di dalam hukum Islam dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, serta pemikiran keIslaman pada civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah khususnya. Selain itu, diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung, berkembang dan akan memperoleh hasil yang semaksimal mungkin.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

Agar sistematisnya dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya dalam mengkaji suatu jual beli dengan konsep hukum Islam untuk melahirkan tinjauan di mana akan muncul suatu penjelasan tentang jual beli daging hewan buruan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan

(*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep jual beli daging hewan buruan yang telah lama terjadi ditengah masyarakat dan menuangkan dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dalam hal ini penulis langsung mengamati mekanisme jual beli daging hewan buruan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dipergustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu Menurut Nazir dalam buku Metode Penelitian mengemukakan bahwa penelitian analisa merupakan penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan metode deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 68.



### **3. Data dan Sumber Data**

Fokus penelitian ini lebih kepada persoalan penentuan hukum dari jual beli daging hewan buruan yang terkait tentang masalah jual beli, mekanisme penjualan, pembayaran dan cara mendapatkan hewan buruan antara pihak-pihak yang melakukan yang tergolong di dalamnya dan oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku jual beli daging hewan buruan dan pihak yang memahami transaksi dalam mekanisme jual beli daging hewan buruan.

#### **b. Data Sekunder**

Data skunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### **4. Populasi dan Sampel**

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa Jagaraga yang berjumlah 150 orang sebagai pemburu. Penulis berupaya untuk mengkaji informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistematik dalam proses jual beli daging hewan buruan.

Sampel yang diambil berjumlah 15 orang berdasarkan Suharsimi Arikunto apabila subjek penelitian kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar atau lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau lebih. Sampel yang diambil berjumlah 15 orang.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam usaha menghimpun atau mengumpulkan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

### **a. Observasi**

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan acara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan, yaitu dengan mengamati mekanisme jual beli daging hewan buruan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jagaraga.

### **b. Interview**

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli daging hewan buruan ini yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif Hukum Islam.

### **c. Metode Analisa Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu jual beli daging hewan buruan ditinjau dari Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui aqad jual beli, sistem jual beli dan apakah tata cara mendapatkan hewan buruan yang disyariatkan dalam Islam. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai jual beli daging hewan buruan yang ditinjau dari Hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif, metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem aqad jual beli, dan mekanisme jual beli daging hewan buruan yang ditinjau dari Hukum Islam. Hasil tinjauannya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Islam Tentang Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli menurut etimologi atau bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, sebenarnya kata jual dan beli memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak penjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.

مُنْفَا بَلُّهُ الشَّيْءِ بِبِ الشَّيْءِ

*Artinya: “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”<sup>14</sup>*

Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2015, Cetakan ke 5), hlm. 73.

pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu fiqih. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari ke dua belah pihak. Khalifah Umar bin Khattab, sangat memperhatikan jual beli yang terjadi di pasar. Beliau mengusir pedagang yang tidak memiliki pengetahuan ilmu fiqih karena takut jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam. Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. di pasar swalayan ataupun mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (ijab) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (qabul) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambarnya.

Adapun pengertian lainnya, jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).<sup>15</sup> Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Kata “tukar menukar” atau “peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut bentuk yang

---

<sup>15</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 402.



dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, secara suka sama suka.<sup>16</sup>

Sementara pengertian lainnya secara terminologi beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau yang tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.

Menurut Imam Hambali

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلِكًا

Artinya : “pertukaran harta dengan harta, saling menjadikan milik”<sup>17</sup>

Menurut Ibnu Qadamah perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta

---

<sup>16</sup> M. Amir Syarifudin, *Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 193.

<sup>17</sup> Ibnu Qadamah, *Al-Muqniy' ala Mukhtasar Al-Kharqiy, Ad-Dar Al-'Ilmiyyah, Beirut*, 1994, Jilid 4, hlm. 74.

dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).<sup>18</sup>

Menurut Haroen Nasroen jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>19</sup> Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam arti benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi, bukan manfaatnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas atau perak, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Terjemahan Fiqh Sunnah diterjemahkan Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki*, IV (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 120-121.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

Sesuai dengan kesepakatan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupai (qimi) dan lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.<sup>22</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang umum dan jual beli yang khusus. Jual beli yang umum ialah suatu perikatan tukar manukar sesuatu yang akan kemanfaatan dan kenikmatan perikatan adalah aqad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar manukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.<sup>23</sup> Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 67.

barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>24</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan aqad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau *ijarah* yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al Qur'an dan sunnah perkataan, serta sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para nabi. Sejak saat itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

### **a. Al Qur'an**

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak dapat terhenti selama

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 70.

manusia itu hidup. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan. Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyari'atkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Q.S Al-Baqarah : 275)<sup>25</sup>

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba), dan sekaligus bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innama al-matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasannya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba, (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) sebagaimana ditetapkan Allah ta'ala. Allah mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak diminta pertanggung jawaban atas apa yang telah ia kerjakan, justru merekalah yang akan diminta pertanggung jawaban. Allah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi

---

<sup>25</sup> Al Qur'an Terjemah *Al-Ikhlās*. Q.S Al-Baqarah: 275, hlm 47.



mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar dari pada sayangnya seorang ibu kepada bayinya.<sup>26</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan.

#### b. Al-Hadits

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadits yang menerangkan tentang jual beli yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling rida.”<sup>27</sup>

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ ارَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ<sup>28</sup>

Artinya: Rasulullah SAW ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab. “usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.”

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli.

---

<sup>26</sup> M. Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsiru Al-Aliyyu Al-Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 54.

<sup>27</sup> Syaikh Amir Alauddin Ali bin Balban Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban Bi Tartib Ini Balban*, Pustaka Azzam tt, hlm. 24.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.<sup>29</sup>

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri, dan jika pekerjaan itu adalah jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang *mabrur* baik dari zatnya maupun sifatnya.

c. Landasan Ijma', yaitu :

Ulama' sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.<sup>30</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan aqad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau *ijarah* yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Syirkah Al Maktabah Litab'i Wan Nasr Indonesia, tt, hlm. 8.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 48.

<sup>31</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 25.

Kaidah 1 dan 2 yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar dan hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

#### **a. Rukun Jual Beli**

Rukun adalah kata mufrat dari kata jama' "arkaan", artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>32</sup> Adapun rukun jual beli adalah:

##### **1) Penjual dan Pembeli**

Agar jual beli dapat disyaratkan menurut agama, maka yang beraqad (penjual dan pembeli) disyaratkan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> M. Abdul Mujieb, Mbruru Thalhah dan Syafi'ah., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: T. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 301.

a) Berakal

Aqad dapat sah menurut hukum apabila yang beraqad tidak dalam keadaan gila, mabuk dan lainnya akal nya masih berjalan normal, masih bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk.

b) Dengan kehendak sendiri

Tidak adanya unsur pemaksaan dari pihak lain dalam aqad jual beli, sebab dalam nash disebutkan atas dasar suka sama suka.

c) Baligh (telah cukup umur)

Yang beraqad harus sudah baligh dan cukup umur, anak-anak kecil tidak sah jual belinya.

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi rukun-rukun jual beli, diantaranya adalah “ijab dan qabul”. Di dalam jual beli harus ada ijab dan qabul, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu memerlukan ijab dan qabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan kadar kebiasaan yang berlaku. Dalam ijab dan qabul tidak perlu kemestian menggunakan kata-kata khusus karena ketentuan hukumnya ada pada aqad dengan tujuan dan makna, bukan pada kata-kata dan bentuk itu sendiri. Syarat ijab dan qabul, sebagai berikut:

1. Antara penjual dan pembeli berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak aqad.
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada harga yang mereka aqadkan, berupa barang yang dijual dengan harga barang tersebut.

3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (mahdi), seperti perkataan penjual “Aku telah jual” dan pembeli “Aku telah terima”.

Jual beli dikatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul itu menunjukkan adanya kerelaan, atau suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan jual beli. Suka sama suka tidak dapat diketahui melainkan dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu kata-kata yang jelas atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksud dengan adanya kerelaan.

#### **b. Syarat Jual Beli**

Hukum dasar dalam masalah muamalah syarat ini adalah keabsahan dan keharusannya bagi orang yang memang disyariatkan dengannya. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, “orang-orang muslim menurut syarat-syaratnya mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Syarat-syarat dalam jual beli adalah merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh masing-masing sebelum melakukan jual beli, sehingga akan jelaslah sah atau tidaknya jual beli tersebut. Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya aqad (*in'iqad*), syarat sahnya aqad, syarat terlaksanakannya aqad (*nafadz*), dan syarat lujum.<sup>33</sup>

Syaikhul-Islam menyebutkan bahwa yang dapat dibatasi dari syarat-syarat itu ada dua pernyataan. Salah satunya dinyatakan: hukum dasar dalam berbagi aqad dan syarat ialah adanya larangan di dalamnya, kecuali yang disebutkan

---

<sup>33</sup> Ibn Abidin., *Raad Al-mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, juz IV, hlm. 5.



pembolehannya dalam syariat. Ini merupakan pernyataan ahli zhahir dan termasuk dasar hukum ahli ushul Abu Hanifah, mayoritas Asy-Syafi'i, sebagian rekan Malik dan Ahmad terkadang Ahmad memberikan alasan kebatilan aqad, karena tidak disinggung oleh *atsar* dan *qiyas*. Begitu pula sebagian rekan-rekannya yang memberikan alasan tidak sahnya syarat, karena ia bertentangan dengan keharusan aqad, mereka berkata, “apapun yang bertentangan dengan keharusan aqad, maka ia batil”. Sedangkan ahli zhahir tidak menganggapnya sah baik aqad maupun syaratnya, kecuali yang pembolehannya ditetapkan nash atau *ijma'*. Sedangkan Abu Hanifah, prinsip hukumnya mengharuskan tidak sahnya syarat dalam aqad, yang bertentangan dengannya secara mutlak. Asy-syafi'i sependapat dengannya, bahwa setiap syarat bertentangan dengan keharusan aqad adalah batil.<sup>34</sup>

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang aqad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya aqad, aqad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiah, aqad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, aqad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika memenuhi syarat lujum, aqad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun untuk membatalkan. Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 636.

akan dibahas sekilas pendapat setiap mazhab tentang persyaratan jual beli tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, persyaratan yang ditetapkan yang berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

1. Syarat terjadinya aqad (in'iqad)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu sebagai berikut.

a. Syarat aqid (orang yang beraqad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Berakal dan mumayyiz

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. Tasharuf yang boleh dilakukan anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi menjadi tiga:

- a) Tasharruf yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.
- b) Tasharruf yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.
- c) Tasharruf yang berada di antara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali. Aqad yang harus berbilang, sehingga tidaklah sah aqad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

b. Syarat dalam Aqad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai dengan ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat 3 syarat berikut ini:

### 1) Ahli Aqad

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli aqad.<sup>35</sup>

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa aqad anak mumayyiz bergantung pada walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak mumayyiz yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan aqad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”<sup>36</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akalannya pada ayat di atas adalah anak yatim masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

2) Qabul harus sesuai dengan ijab.

3) Ijab dan qabul harus bersatu.

Yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.

4) Tempat aqad.

Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

---

<sup>35</sup> Alaudin Al-Kasani. *Bada' Ash-shanai' fi Tartib Asy-syara'i*. juz V. hlm. 133

<sup>36</sup> Al Qur'an Terjemah *Al-Ikhlâs*. Q.S. An-Nisa ayat 5. hlm 77.

#### 5) Ma'qud 'alaih (objek aqad)

Ma'qud 'alaih harus memenuhi empat syarat.<sup>37</sup>

a) Ma'qud 'alaih harus ada, tidak boleh aqad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan secara umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah yang belum tampak hasilnya.

b) Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

c) Benda tersebut milik sendiri.

d) Dapat diserahkan.<sup>38</sup>

#### c. Syarat Pelaksanaan Aqad (*Nafadz*)

1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk aqad

2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain

Oleh sebab itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*mauqud*).<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Op.Cit.*, hlm. 138-147.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 148

<sup>39</sup> *Ibid.*

Berdasarkan nafadz dan wakaf (penangguhan), jual beli terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Jual beli *nafidz*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli tersebut dikategorikan sah.

2. Jual beli *mauquf*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan nafadz, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan aqad, seperti jual beli fudhul (jual beli milik orang lain tanpa izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli fudhul dipandang sah. Sebaliknya, jika pemiliknya tidak mengizinkan maka dipandang batal.

d. Syarat sah aqad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus :

1) Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2) Syarat khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
  - b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
  - c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
  - d) Terpenuhi syarat penerimaan.
  - e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
  - f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih ada di tangan penjual.
- e. Syarat lujum (kemestian)
- Syarat ini hanya ada satu, yaitu aqad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang aqad dan menyebabkan batalnya aqad.

Menurut Mazhab Malik

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang aqad), *shighat*, dan *ma'qud 'alaih* (barang) berjumlah beberapa syarat.

#### 1) Syarat *Aqid*

Adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:



- a) Penjual dan pembeli harus mumayyiz.
- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- c) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
- d) Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula dipandang sah jual beli orang yang buta.

## 2) Syarat dan *sighat*

- a) Tempat aqad harus bersatu.
- b) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah

Diantara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu aqid secara adat.

### c) Syarat Harga dan yang dihargakan

- (1) Bukan barang yang dilarang syara'.
- (2) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual *khamr*, dan lain-lain.
- (3) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
- (4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang aqad.
- (5) Dapat diserahkan.

## Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan aqid, shigot, dan ma'qud alaih. Persyaratan tersebut adalah:

## 1. Syarat *aqid*

### a. Dewasa atau sadar

*Aqid* harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, *aqad* anak *mumayyiz* dipandang belum sah.

### b. Tidak dipaksa atau tanpa hak.

### c. Islam

d. Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti *hadist*, kitab-kitab *fiqh*, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lain pada firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 141 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ  
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ  
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَن تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin.” (Qs. An-nisaa ayat 141)<sup>40</sup>

### e. Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslim.

---

<sup>40</sup> Al Qur'an Terjemah Al-Ikhlâs. An-Nisa ayat 141, hlm 101.

## 2. Syarat Shighat

### a. Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat aqadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian tidak sah berkata, “saya menjual kepadamu!” tidak boleh berkata, “saya menjual kepada Ahmad,” padahal nama pembeli bukan Ahmad.

### b. Ditujukan pada seluruh badan yang aqad

Tidak sah mengatakan, “saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu.”

### c. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.

Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

### d. Harus menyebutkan barang atau harga.

### e. Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud).

### f. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna (jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, jual beli yang dilakukannya batal).

### g. Ijab qabul tidak terpisah.

Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

### h. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.

i. Tidak berubah lafazh.

Lafazh ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, “saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum adalah qabul.

j. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna

k. Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Aqad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan aqad.

l. Tidak berkaitan dengan waktu

### 3. Syarat Ma'qud Alaih (barang)

a. Suci.

b. Bermanfaat.

c. Dapat diserahkan.

d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.

e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan aqad.

### Mazhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam aqid, sighoat, dan ma'qud 'alaih

## 1. Syarat aqid

### a. Dewasa

Aqid harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

### b. Ada keridhoan

Masing-masing *aqid* harus saling meridhoi, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

## 2. Syarat *Sighat*

### a. Berada ditempat yang sama.

### b. Tidak terpisah.

Antara ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.

### c. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Aqad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan aqad.

## 3. Syarat *Ma'qud Alaih*

### a. Harus berupa harta.

Ma'qud alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.

Ulama Hanabillah mengharamkan jual beli Al Qur'an baik untuk orang muslim maupun kafir sebab Al Qur'an itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya. Begitu pula mereka melarang jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya

b. Milik penjual secara sempurna

Dipandang tidak sah jual beli *fudhul*, yakni menjual barang tanpa seizing pemiliknya.

c. Barang dapat diserahkan ketika aqad.

d. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.

Ma'qud alaih harus jelas dan diketahui kedua belah pihak yang melangsungkan aqad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang yang buta.

e. Harga diketahui oleh kedua pihak yang aqad.

f. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan aqad tidak sah.

g. Barang, harga, dan aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan aqad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli



dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:<sup>41</sup>

- a. Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan aqad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanam).
- c. Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian antara satu pihak.

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli dengan lisan.
2. Jual beli dengan perantara.
3. Jual beli dengan perbuatan.

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>42</sup>

1. Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu shahih dan dapat mengikat keduanya.

---

<sup>41</sup> H. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 113-119.

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 128-137.

2. Jual beli yang bathil yaitu jual beli tersebut satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, macam-macam jual beli *bathil*:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Para ulama fiqh bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkarnya.

c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Jual beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsure tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik.

d. Jual beli barang najis

Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah seperti babi, bangkai, darah, khamr, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna-makna dalam arti hakiki menurut syara'.

e. Jual beli *al-urbhan*

Jual beli bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada penjual maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik penjual. Jual beli tersebut dilarang.

f. Jual beli *fasid*

Menurut Ulama Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang

dijual belikan maka hukumnya batal. Seperti memperjual belikan benda-benda haram (*khamr*, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan *fasid*. akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Diantara jual beli yang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, antara lain:<sup>43</sup>

- 1) Jual beli al *majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
- 2) Jual beli barang yang *ghoib*, tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 3) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
- 4) Jual beli orang buta. Dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjual belikan. Menurut fuqoha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia dapat memiliki hak *khiyar* sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau penciuman. Menurut Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah, kecuali sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta barang yang diperjual belikan bersifat majhul.<sup>44</sup>
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya barang-barang yang diharamkan menjadi harga.

---

<sup>43</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2009), hlm. 112.

<sup>44</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2002), hlm. 136-139.

- 6) Jual beli *ajal*. Misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga RP. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, dengan harga Rp. 75.000,-.
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamr. Apabila penjualan anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu produsen khamr.
- 8) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ungkapan pedagang: “jika tunai harganya Rp. 10.000,- dan jika berhutang harganya Rp. 15.000,-.
- 9) Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

## **5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam**

Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan teramakannya harta manusia dengan cara yang bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan di kalangan kaum muslim. Berikut beberapa contoh di antaranya:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama. Seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan jual beli ini haram hukumnya.

- c. Jual beli binatang yang masih ada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli *muhalaqah*. *Muhalaqah* ini banyak sekali, misalnya seorang menjual tanaman kepada orang lain dengan 100 farak gandum. Farak ialah semacam timbangan yang beratnya 16 khati atau 3 gantang. Menurut tafsir lain, *muhalaqah* ini menjual tanaman yang masih di ladang atau sawah dengan tamar (gandum) secara khatian. Hal ini karean *muhalaqah* berasal dari *haqalah* yang berarti tanah sawah atau kebun.
- e. Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lain-lainnya.
- f. *Muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian.
- g. *Munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab qabul.
- h. *Muzabanah*, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan kilo, sehingga akan merugikan yang punya padi kering.
- i. *Gharar*, jual beli barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi di dalamnya buruk, dan yang sejenisnya.

Menurut Ibn Al-Jazi Al-Maliki,<sup>45</sup>

1. Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang.
3. Tidak diketahui sifat atau harga.
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
5. Tidak diketahui masa yang akan datang.
6. Menghargakan dua kali pada satu barang.
7. Menjual barang yang diharapkan selamat.
8. Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh maka wajib membeli.
9. Jual beli *munabazah* dan jual beli *mulatsamah*.

## **B. Hukum Islam Tentang Hewan Buruan**

### **1. Pengertian Berburu**

Diantara sesuatu yang halal dan baik yang dimubahkan Allah bagi kita untuk memakannya yaitu ash-shahid yang menurut bahasa artinya berburu. Berburu dapat diartikan sebagai suatu hewan yang ditangkap dari jenis hewan yang dapat dimakan dagingnya dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan kemudian. Ulama mazhab merinci perihal hukum berburu menurut motivasi orang yang melakukan berburu tersebut. Berburu hukumnya adalah mubah apabila daging buruan bisa dipakai untuk dikonsumsi dan hukumnya sunnah

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 136.



apabila dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan hukumnya menjadi wajib jika dipakai untuk kelangsungan hidup dalam keadaan darurat namun akan berubah menjadi makruh jika hanya dilakukan untuk senang-senang atau main-main dan haram jika berburu yang dilakukan hanya untuk menyiksa atau menganiaya binatang buruan tersebut.

Berburu hukumnya boleh (*mubah*), jika tidak membuat kemudharatan bagi manusia, misalnya merusak atau melenyapkan tanaman (kebun) orang lain, atau membuat bingung (terganggu) mereka di tempat tinggalnya, atau juga hanya untuk main-main atau kesenangan saja. Menangkap hewan halal yang liar, dengan melalui bantuan alat yang tidak akan mampu dihadapi oleh hewan buruan tersebut. Binatang buruan semuanya halal, kecuali binatang buruan yang diharamkan, baik binatang buruan laut maupun binatang buruan darat. Buruan yang dimubahkan adalah buruan yang ditangkap berdasarkan tujuan menyembelihnya, jika tidak, maka hukumnya haram. Rasulullah SAW juga melarang membunuh hewan kecuali untuk dimakan.

## 2. Dasar Hukum Berburu

Adapun dasar hukum berburu tentang kebolehan berburu telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan hadits serta ijma' ulama. Allah SWT berfirman: (QS Al-Maidah ayat 96)

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ  
مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”<sup>46</sup>

Dalam ayat lain (Q.S Al-Maaidah : Ayat 2)

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>47</sup>

Para ulama sepakat bahwa perintah berburu dalam ayat tersebut muncul setelah adanya larangan dan menunjukkan adanya kebolehan seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-jumu’ah ayat 10 yaitu :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

<sup>46</sup> Al Qur’an Terjemah Al-Ikhlâs. Q.S. Al-Maaidah, hlm. 124.

<sup>47</sup> Al Qur’an Terjemah Al-Ikhlâs. Q.S. Al-Maaidah, hlm. 106.

*Artinya: "Apabila shalat telah dilaksanakn, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung".<sup>48</sup>*

Maksud dari ayat tersebut adalah kebolehan mencari rezeki karena adanya perintah tersebut turun setelah adanya larangan, meskipun para fuqaha masih memperselisihkan apakah perintah (suruhan) itu menunjukkan kebolehan (ibahah). Atau tidak menunjukkannya yang pada dasarnya suatu perintah itu menunjukkan wajib<sup>49</sup>. Selain dari itu, di dalam hadits diterangkan juga tentang kemubahan atau kebolehan berburu dengan anjing buruan seperti yang dijelaskan pada hadits dari Sufyan bin Abi Zubair,

وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ أَقْتَنَى كَابَالًا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِرَاطٌ.

*Artinya: Dari Sufyan Bin Abi Zuhair, ia berkata : aku pernah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda : "siapa yang memelihara anjing bukan untuk menjaga tanaman dan tidak untuk (menjaga) ternak maka pahala amalnya setiap hari berkurang satu qirath." (HR. Muslim).<sup>50</sup>*

Ulama mazhab merinci perihal hukum berburu menurut motivasi orang yang melakukan perburuan tersebut. Berburu hukumnya adalah mubah apabila daging buruan bisa dipakai untuk dikonsumsi dan hukumnya sunnah apabila dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan hukumnya menjadi wajib jika dipakai untuk kelangsungan hidup dalam keadaan darurat namun akan

---

<sup>48</sup> Al Qur'an Terjemah Al-Ikhlās. Q.S Al-Jumu'ah ayat 10, hlm. 554.

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, tt, hlm. 340.

<sup>50</sup> Shahih Muslim No. 2951.

berubah menjadi makruh jika hanya dilakukan untuk senang-senang atau main-main dan haram jika berburu yang dilakukan hanya untuk menyiksa atau menganiaya binatang buruan tersebut.

**a. Hukum Berburu dengan Anjing**

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat jika hasil buruan yang sempat tergigit oleh anjing maka hukumnya adalah menjadi [makanan haram](#) dan harus dibersihkan sebanyak tujuh kali dan satu diantaranya dibersihkan memakai air yang sudah dicampur dengan tanah sehingga hewan buruan tersebut sudah halal atau suci.

Sementara ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali mengatakan jika bekas gigitan anjing hukumnya adalah halal dan tidak wajib untuk dibersihkan sehingga secara garis besar, hewan buruan tersebut merupakan [hewan halal menurut Islam](#) untuk dikonsumsi namun dengan syarat jika hewan berburu sudah terlatih.

**b. Hukum Halal Menjadi Khilaful Awla**

Dari pendapat Al Hanafiyah, hukum berburu akan berubah dari halal jadi khilaful awla atau bertentangan dengan yang utama bisa terjadi disaat berburu dilakukan pada malam hari. Akan tetapi pendapat ini tidak sama dengan mazhab Al Hanabilah dalam kitab Al Mughni jika tidak masalah berburu pada malam hari.

**c. Hukum Halal Menjadi Makruh**

Hukum berburu yang tadinya halal juga bisa berubah menjadi makruh apabila tujuan berburu yang dilakukan hanya untuk bersenang-senang dan

menjadi perbuatan yang sia-sia dan bukan untuk dikonsumsi atau karena kebutuhan. Ini diambil berdasarkan hadits riwayat Al Imam Muslim,

لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

Artinya: “Janganlah membunuh hewan yang punya ruh” (HR. Muslim).<sup>51</sup>

Para ulama juga mengatakan hukum asal dari berburu adalah halal pada beberapa kondisi, akan tetapi bisa berubah menjadi haram seperti:

#### 1) Berburu saat Berihram

[Fungsi Al Quran dalam kehidupan](#) memang sudah mencakup dari segala segi. Dalam Al Quran Al Karim disebutkan jika haram berburu apabila dilakukan oleh orang yang sedang berihram.

#### 2) Berburu Hewan di Tanah Haram

Hewan yang hidupnya di tanah haram atau disebut dengan haram juga merupakan hewan yang dilarang untuk diburu.

#### 3) Berburu Hewan Kepunyaan Orang Lain

Berburu hewan yang merupakan kepunyaan orang lain hukumnya diharamkan sebab ada pemilik hewan tersebut dan tentunya tidak ingin hewan miliknya diburu dan dibunuh. Dalam hal ini, hewan yang dimaksud bukanlah jenis hewan liar namun hewan yang sudah ada pemiliknya.

#### 4) Berburu Hewan dilindungi

Saat ini, banyak perburuan liar dengan jumlah yang semakin bertambah khususnya pada jenis hewan yang sudah hampir punah. Oleh karena itu, banyak pemerintahan dunia yang melarang perburuan jenis hewan tertentu

---

<sup>51</sup> Shahih Muslim No. 1957.

dan bahkan dibentuk program nasional serta internasional yang berfungsi untuk menjaga beberapa hewan tersebut dari kepunahan.

Oleh karena itu, meskipun larangan bukanlah berasal dari pemerintahan Islam akan tetapi tetap harus diperhatikan umat muslim karena umat muslim juga memiliki kewajiban untuk melestarikan alam dan menjaga keseimbangan biota sehingga berburu hewan liar yang sudah dilindungi hukumnya berubah menjadi [binatang haram dalam Islam](#) yang diharamkan untuk diburu.

### **3. Syarat-Syarat Berburu.**

Banyak sekali orang-orang Arab dan bangsa-bangsa lain yang hidupnya dari berburu, oleh karena itu Al Qur'an dan hadits menganggap penting pada persoalan ini dan ahli fiqih kemudian membuat bab tersendiri, dengan menguraikan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang wajib dan mana yang sunnah.

Banyak binatang dan burung-burung yang dagingnya baik sekali, tetapi sukar didapatkan oleh manusia, karena tidak termasuk binatang peliharaan. Untuk itu Islam tidak memberikan persyaratan dalam menyembelih binatang-binatang tersebut, seperti halnya persyaratan yang berlaku pada binatang-binatang peliharaan yang harus disembelih pada lehernya. Islam menganggap cukup apa yang dikiranya mudah untuk memberikan keringanan dan keleluasaan kepada manusia. Islam membuat beberapa peraturan dan persyaratan yang tunduk pada aqidah dan tata tertib Islam serta membentuk setiap persoalan umat Islam dalam suatu karakter Islam.



Syarat-syarat itu yang bertalian dengan si pemburu itu sendiri, dan ada yang bertalian dengan binatang yang diburu, juga ada yang bertalian dengan binatang yang diburu, juga ada yang bertalian dengan alat yang dipakai untuk berburu. semua. Semua peralatan tersebut, berlaku hanya untuk binatang darat. Adapun binatang laut, dihalalkan oleh Allah tanpa suatu ikatan apapun.

a. Syarat-syarat yang berlaku untuk berburu.

Syarat yang berlaku untuk berburu binatang darat sama halnya dengan syarat yang berlaku bagi orang yang akan menyembelih hewan, yaitu:

- 1) Orang Islam atau ahli kitab (termasuk orang yang dapat dikategorikan sebagai ahli kitab). Dengan demikian hasil buruan orang Yahudi dan Nasrani tak ubahnya seperti sembelihan mereka.<sup>52</sup>
- 2) Mumayiz dan berakal, artinya tidak halal hasil buruan anak-anak yang belum mumayiz, hasil buruan orang gila dan orang mabuk, seperti juga tidak halalnya hasil sembelihan mereka.
- 3) Bukan sedang berihram, karena seorang muslim yang sedang berihram berarti dia dalam fase kedamaian dan keamanan yang menyeluruh yang berpengaruh sangat luas terhadap alam sekelilingnya, termasuk binatang dipermukaan bumi dan burung yang sedang terbang diangkasa.<sup>53</sup> Sebagai firman Allah SWT : (Q.S Al-Maaidah ayat 96)

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ  
مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 246.

<sup>53</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, Mansyurat Al-Maktabah Al-Islami*, 1969, hlm. 38.

*Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut[442] dan makanan (yang berasal) dari laut[443] sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."<sup>54</sup>*

Maksudnya: binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memikat, dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut disini ialah: sungai, danau, kolam, dan sebagainya. Maksud ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar di pantai dan sebagainya.

b. Syarat yang berkenaan dengan binatang buruan

Binatang yang dihalalkan untuk diburu adalah binatang yang dapat dimakan dagingnya dan tidak dapat dimakan dagingnya. Apabila binatang itu tidak dapat dimakan dagingnya, maka dihalalkan memburunya karena untuk menghilangkan (menghindarkan) kebuasannya, seperti juga dihalalkan untuk membunuhnya. Begitu juga dihalalkan memburu binatang untuk diambil manfaatnya, misalnya untuk diambil giginya atau bulunya. Adapun binatang buruan yang dapat dimakan dagingnya, maka dihalalkan untuk memburunya dengan syarat-syarat, antara lain :

- 1) Binatang tersebut sifatnya liar, sehingga dengan sifatnya yang liar itu manusia tidak dapat menjinakkan, sehingga dengan sifatnya yang liar itu manusia tidak dapat menjinakkannya, misalnya: kijang, keledai liar, sapi liar, kelinci, dan sejenisnya, maka halal untuk diburu. Namun, apabila

---

<sup>54</sup> Al Qur'an Terjemahan Al-Ikhlas. Q.S Al-Maaidah ayat 96, hlm 124.

binatang tersebut menjadi jinak, maka tidak halal kecuali dengan menyembelihnya, seperti halnya menyembelih unta, sapi, dan kambing.

2) Binatang itu terhalang dan tidak terjangkau oleh manusia untuk ditangkap, maka tidak halal untuk memburu binatang yang mampu ditangkap manusia seperti ayam, angsa, unggas, merpati jinak, dan sejenisnya. Karena binatang tersebut jinak dan memungkinkan untuk ditangkap. Berbeda dengan merpati gunung dan sejenisnya, karena binatang tersebut liar dan tidak memungkinkan untuk ditangkap, maka halal untuk diburu.

3) Binatang tersebut bukan dalam kondisi milik orang lain, maka haram memburu binatang buruan milik orang lain, dan hasil buruannya tidak halal.

4) Binatang itu bukan jenis dari jenis binatang yang bertaring dan berkuku tajam, seperti srigala dan binatang buas harimau dan sejenisnya yang tidak dihalalkan untuk dimakan.

5) Binatang itu tidak dalam keadaan hidup ketika ditemukan setelah diburu, jika binatang itu ditemukan dalam keadaan hidup maka tidak sah dimakan kecuali setelah menyembelihnya. Hal ini didasarkan pada hadits nabi SAW:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أُرْسِلَتْ كِلَابُكَ الْمُعْلَمَةُ وَذَكَرْتَ اللَّهَ فَكُلْ مِمَّا مَسَنَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكُؤُفُ فَلْيَتَأْكَلْ. فَإِنْ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا مَسَكَ عَلَى

نَفْسِهِ (رواه أحمد)

*Artinya: Dari Adi bin Hatim r.a. dari Nabi SAW., ia bersabda : “Apabila engkau melepaskan anjingmu yang terlatih dan engkau sebut nama Allah maka makanlah hasil tangkapannya kecuali kalau anjingmu itu memakan (hasil buruannya itu) maka janganlah engkau makan,*

*karena aku khawatir bahwa ia menangkap itu untuk dirinya sendiri,”  
(Hr. Ahmad, Bukhori dan Muslim).<sup>55</sup>*

#### 4. Alat-alat yang digunakan untuk berburu

Alat yang dipergunakan untuk berburu ada dua macam, yaitu benda (alat) yang dapat melukai seperti tombak, panah, dan pedang, dan binatang yang dapat melukai yang telah dididik sebelumnya seperti anjing, singa, burung elang, rajawali, dan sebagainya.<sup>56</sup> Sebagaimana yang dijelaskan pada hadits Nabi SAW yaitu:

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْهُ وَذَكَرْتُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْكَ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ. = رواه احمد وأبو داود<sup>57</sup>

*Artinya: Dari Adi bin Hatim (ia berkata): sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “anjing atau burung yang engkau latih kemudian engkau lepaskannya dan engkau sebut asma Allah atasnya maka makanlah hasil tangkapannya.” Aku bertanya: jika dibunuh? Ia menjawab: “jika dibunuh sedang ia tidak memakannya maka sebenarnya tangkapannya untukmu.” (HR. Ahmad dan Abu Daud.*

Penjelasan dari hadits di atas adalah Syarih Rahimullah berkata: perkataan “anjingmu yang terlatih” itu, yang dimaksud anjing yang terlatih yaitu “anjing yang telah dilatih oleh pemiliknya untuk berburu sehingga kalau dilepaskan ia akan mencari mangsa dan kalau di stop ia akan berhenti dan jika berhasil menangkap binatang maka ia peruntukan bagi tuannya”.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Drs. Mu’ammal Hamidy, Drs. Imron AM, Umar Fanany, B.A, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 6 (Surabaya: PT Bina Ilmu, Jl. Tunjungan 53 E, 60275), hlm. 3031.

<sup>56</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal fi Al-Islam*, Mansyurat Al-Maktabah Al-Islami, 1969, hlm. 65.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 3030.

<sup>58</sup> *Ibid.*

a. Berburu dengan senjata

Berburu yang dilakukan oleh orang terkadang dengan menggunakan senjata tajam yang dapat melukai binatang yang diburu sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ عَدِيِّ قَلٍّ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ : يَحِلُّ لَكُمْ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَكَرْتُمْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَخَزَقْتُمْ فَأَكُلُوا مِنْهُ = رواه أحمد<sup>59</sup>

*Artinya: dari Adi r.a., ia berkata : aku bertanya : ya Rasulullah ! kami ini kaum yang suka berburu dengan memanah. Bagaimanakah cara yang boleh bagi kami? Ia menjawab: “yang halal bagi kamu ialah binatang yang kamu sembelih sedang yang kamu panah dengan menyebut asma Allah atasnya (kemudian mati), maka makanlah.” (HR. Ahmad).*

Mengenai senjata tajam para fuqaha telah sepakat mengenai macamnya, yaitu tombak, pedang, dan panah, karena sudah ada ketegasannya dalam Al Qur'an dan hadits. Dengan demikian, senjata dan sejenisnya yang dapat melukai hal-hal yang diperselisihkan pemakaiannya dalam penyembelihan hewan jinak, seperti gigi, kuku, dan tulang.<sup>60</sup> Berburu dengan senjata tajam mempunyai dua persyaratan, yaitu:

- 1) Hendaknya alat atau senjata tersebut dapat menembus kulitnya, dimana binatang tersebut mati karena ketajaman senjata tersebut bukan karena beratnya.<sup>61</sup>
- 2) Harus disebut Asma Allah ketika melemparkan (melepas) alat tersebut atau ketika memukulkannya. Adapun larangan memakan buruan yang terkena peluru dan tidak sempat disembelih serta menganggapnya sebagai binatang

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 3035

<sup>60</sup> Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, hlm.333.

<sup>61</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm. 65.

yang mati terpukul sesungguhnya yang dimaksud adalah peluru yang terbuat dari tanah, lalu dikeringkan dan kemudian dilemparkan. Hal ini berbeda dengan peluru yang berasal dari senjata atau timah.<sup>62</sup>

b. Berburu dengan menggunakan binatang pemburu

Kalau berburu dengan menggunakan anjing atau burung elang (binatang pemburu), maka yang harus ada dalam masalah tersebut, adalah:

- 1) Binatang tersebut harus diajar (dilatih), yang dimaksud diajar kemampuan si tuan untuk mengatur dan mengarahkan, di mana jika anjing itu dipanggil ia akan bertahan dan kalau diusir ia akan pergi.<sup>63</sup>
- 2) Binatang tersebut harus memburu buruan untuk tuannya. Menangkap atau memburu untuk tuannya, maksudnya adalah bahwa binatang tersebut tidak memakan binatang hasil buruannya, jika ia memakannya berarti ia tidak menangkap buruan untuk tuannya, tetapi untuk dirinya, maka buruan tersebut tidak halal.<sup>64</sup>
- 3) Menyebut nama Allah ketika hendak melepaskannya, yaitu seperti menyebut asma Allah ketika hendak melepaskan panah, tombak, atau memukulkan pedang. Hal ini berdasarkan Al Qur'an dan hadits terdahulu. Kemudian, jika lupa menyebut nama Allah ketika melepaskannya, maka susullah penyebutan asma Allah ketika hendak memakannya, sebagaimana dilakukan dalam hal penyembelihan.

---

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 271.

<sup>63</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 272.



### **BAB III**

## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Desa Jagaraga Kabupaten Lampung Barat**

#### **1. Sejarah Berdirinya Desa Jagaraga**

Desa Jagaraga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Desa Jagaraga pada awalnya adalah daerah yang tidak ada penghuninya, hanya sebuah hutan yang tidak ada penghuninya sama sekali. Kemudian pada tahun 1882-1888 didatangi dan dihuni oleh kelompok masyarakat yang dipimpin oleh pembara.<sup>65</sup>

Berdatangannya masyarakat ke Desa Jagaraga Kecamatan Sukau dan dengan mempunyai keturunan serta perkembangan zaman pun berubah, pendudukan Desa Jagaraga Kecamatan Sukau mulai ramai, maka datanglah penduduk-penduduk baru untuk mendiami desa tersebut, sehingga desa Jagaraga tidak hanya berpendudukan masyarakat satu suku, melainkan telah berbaur dengan suku-suku lain. Dengan kehadiran warga baru akhirnya mereka berkerja sama membangun dan meningkatkan mata pencaharian mereka dengan bertani.

Pada awalnya, Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh pembarap (Kepala Desa) mulai dari tahun 1882-1888 menurut cerita penggawa lama yang bernama Elwan Radensi yang bertugas dari tahun 1971-1995 bahwa sepengetahuan beliau adalah:

---

<sup>65</sup> Dokumentasi Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dicatat pada tanggal 20 September 2014.

- a. Pembarap Bastam pada tahun 1947-1953.
- b. Pembarap Abdurrahman pada tahun 1953-1968.
- c. Pembarap Amir pada tahun 1968-1978.
- d. Pembarap Nurdin pada tahun 1978-1983.

Kemudian pada tahun 1984, berdasarkan UUD No. 5 Tahun 1984 dan Lembaran Negara (LN) 1984/22;TLN No.3274, Tentang Perindustrian, sebutan pasirah dan pembarap diganti menjadi Kepala Desa, dan Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh beberapa Kepala Desa,<sup>66</sup> yaitu :

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a. Tahun 1972-1978     | Bapak H. Usman        |
| b. Tahun 1978-1983     | Bapak Muhammad Bakri  |
| c. Tahun 1983-1988     | Bapak Zainal S.H      |
| d. Tahun 1988-1993     | Bapak Muhammad Bakri  |
| e. Tahun 1993-1998     | Bapak Zainul Hakim    |
| f. Tahun 1998-2002     | Bapak Sulton S.Ag.    |
| g. Tahun 2002-2003     | Bapak Heri S.Ag (PJS) |
| h. Tahun 2003-2004     | Bapak Ameren (PJS)    |
| i. Tahun 2004-2009     | Bapak Nopi Yanto S.Pd |
| j. Tahun 2009-2014     | Bapak Nopi Yanto S.Pd |
| k. Tahun 2014-sekarang | Bapak Nopi Yanto S.Pd |

Secara geografis Desa Jagaraga terletak di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan luas wilayah menurut penggunaan 1.697,00 Ha, luas

---

<sup>66</sup> Dokumentasi Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dicatat pada tanggal 20 September 2014.

wilayah tanah sawah 18,00 Ha, luas wilayah tanah kering 79,00 Ha, Luas wilayah tanah perkebunan 1.572,00 Ha, luas wilayah tanah fasilitas umum 28,00 Ha, dengan penduduk keseluruhan berjumlah 1.375 jiwa yang terdiri dari laki-laki 673 jiwa, dan perempuan 702 jiwa.<sup>67</sup> Adapun batas wilayah Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Sukau.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Sukau.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kawasan.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau.

Sedangkan kondisi geografis Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yaitu sebagai berikut:

- a. Ketinggian dari permukaan laut 900,00 mdl.
- b. Banyaknya curah hujan 50,00 mm.
- c. Suhu udara rata-rata 36,00<sup>0</sup> C.
- d. Orbitasi (jarak pusat pemerintahan)<sup>68</sup> sebagai berikut:
  - 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 5 km. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor yaitu 20 menit.
  - 2) Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten 10 km. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor 1 jam.
  - 3) Jarak dari pusat pemerintah provinsi 1500 km. lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor yaitu 7 jam.

---

<sup>67</sup> Dokumentasi Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dicatat pada tanggal 20 September 2014.

<sup>68</sup> Dokumentasi Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dicatat pada tanggal 20 September 2014.

## 2. Keadaan Demografis Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat memiliki penduduk 340 KK atau 1357 Jiwa, dari jumlah tersebut laki-laki berjumlah 673 jiwa dan perempuan berjumlah 702 jiwa. Berikut merupakan jumlah penduduk menurut klasifikasi umur di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Desa Jagaraga**  
**Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat**

NO	USIA	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa	Presentase
		L	P		
1	0-12 Bulan	19	13	32	
2	1-6 Tahun	82	92	174	
3	7-13 Tahun	120	129	249	
4	14-20 Tahun	76	91	167	
5	21-27 Tahun	122	101	223	
6	28-34 Tahun	69	52	121	
7	35-45 Tahun	58	46	104	
8	46-55 Tahun	66	57	125	
9	55 Tahun Keatas	61	70	131	

Besarnya jumlah penduduk desa Jagaraga Kecamatan Sukau tersebut adanya berpendidikan rendah dan juga berpendidikan tinggi, ada yang tidak lulus sekolah dasar dan tamatan sekolah dasar saja dan ada juga penduduk yang lulus SLTP/SMP, dan SLTA/SMA, D1, D2,D3, bahkan ada juga penduduk yang berpendidikan Sarjana. Untuk lebih jelasnya mengenai penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Perincian Penduduk Menurut Lulusan Pendidikan Umum di Desa**  
**Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Belum sekolah usia 3-6 tahun	50	40	90
2	TK/ Taman Bermain usia 3-6 tahun	10	14	114
3	Tidak Pernah Sekolah usia 7-10 tahun	20	4	24
4	Sedang Sekolah usia 7-18 tahun	24	27	75
5	Tidak pernah Sekolah usia 18-56 tahun	2	1	3
6	Pernah SD tetapi tidak tamat	50	73	126
7	Tamat SD/ Sederajat	80	93	173
8	Tidak tamat SLTP/SMP usia 12-56 tahun	12	45	230
9	Tamatan SMP/Sederajat	75	34	109
10	Tamat SMA/Sederajat	180	90	379
11	Tamat D3/Sederajat	5	9	14
12	Tamat S1	6	18	38
Jumlah Total		514	448	1375

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat di desa Jagaraga paling banyak lulusan SLTA/SMA. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat di desa Jagaraga dalam bidang pendidikan tergolong kurang maju, kondisi pendidikan seperti ini pada akhirnya sulit untuk menerima berbagai macam perubahan sosial, ekonomi dan agama, yang akibatnya akan berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat.

#### **a. Keadaan Sosial Ekonomi di Desa Jagaraga**

Kondisi perekonomian atau mata pencaharian masyarakat Desa Jagaraya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sebagian besar adalah tani yang sebagian besar hanya lulus SLTP dan SLTA, sedangkan mata pencaharian

sebagai PNS sebagian besar lulus dari Akademi atau Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Perincian Penduduk Menurut Tingkat Ekonomi di Desa Jagaraga**  
**Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tani	245	200
2.	Buruh Tani	40	35
3.	PNS	3	9
4.	Pengrajin	3	0
5.	Perternak	53	40
6.	Montir	2	0
7.	Pengobatan Alternatif	5	0
8.	TNI	3	0
9.	POLRI	1	0
10.	Guru Swasta	5	3
11.	Pedagang keliling	3	0
12.	Pembantu Rumah Tangga	0	5
13.	Dukun Tradisional	2	0
14.	Wiraswasta	51	37
15.	Ibu Rumah Tangga	0	237
16.	Pensiun	1	0
17.	Perangkat Desa	12	2
Jumlah Total Penduduk		814 Orang	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui tingkat ekonomi masyarakat di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau memiliki jenis usaha ekonomi yang beragam. Sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan dibidang lainnya. Jenis usaha ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat sangat tergantung pada keadaan cuaca yang



nantinya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi masyarakat Desa Jagaraga.

#### **b. Keadaan Sosial Budaya Desa Jagaraga**

Masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sukau tergolong masyarakat Heterogen, yang memiliki sikap dan sifat yang berbeda dalam menanggapi suatu permasalahan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta kesukuan yang berbeda- beda. Kenyataan ini diketahui bahwa kegiatann dan keadaan sosial budaya tidak mempengaruhi persamaan dan perbedaan.

Pada masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sukau terdapat beberapa suku: Ogan, Jawa, Sunda, Lampung. Adapun mayoritas suku Ogan, kemudian diikuti suku lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian data dari jumlah penduduk Desa Jagaraga Kecamatan Sukau dilihat dari jumlah suku bangsa, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perincian Pendudukan Menurut Suku Desa Jagaraga**  
**Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat**

No	Suku	Laki-laki	Perempuan
1.	Sunda	65	70
2.	Jawa	102	131
3.	Lampung	54	7
4.	Ogan	502	494
Jumlah		673	702

Berdasarkan tabel diatas maka terlihatlah bahwa jumlah penduduk berdasarkan suku yang mendiami atau bertempat tinggal di Desa Jagaraga adalah suku Ogan, Sunda, Lampung, Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa Desa

Jagaraga adalah mayoritas penduduk asli daerah itu sendiri dan dari keberagaman suku ini menjadikan masyarakat desa Jagaraga semakin bersatu dan saling peduli antar sesamanya.

Selain itu masyarakat terbina secara intensif dan memiliki kesadaran yang cukup baik di mana mereka telah mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun untuk orang lain yang bersifat kemasyarakatan, seperti kegiatan gotong royong yang dikerjakan secara bersama-sama baik gotong royong program pemerintah maupun gotong royong yang memperingati hari-hari besar. Dalam hal gotong royong program pemerintah diantaranya kebersihan lingkungan, ronda atau siskamling, memperbaiki jalan, dan kegiatan lain berjalan dengan baik.

#### **c. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Jagaraga**

Manusia mempunyai kebutuhan spiritual dan material usaha untuk menampung kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan, maka umat akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lembaga tersebut, begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap agama Islam.

Masyarakat desa Jagaraga mayoritas menganut agama Islam, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang memiliki kepercayaan dan menganut agama lain seperti Kristen. Walau berbeda keyakinan, masyarakat desa Jagaraga memiliki toleransi yang tinggi antar sesamanya. Untuk lebih jelasnya tentang perincian penduduk menurut agama di desa Jagaraga dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Perincian Penduduk Menurut Agama di Desa Jagaraga**  
**Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	670	698
2	Kristen	3	4
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
Jumlah		673	702

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penduduk desa Jagaraga mayoritas agama Islam yaitu berjumlah 1.368 jiwa dan pemeluk agama lain yaitu agama Kristen berjumlah 7 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam tentunya dapat dijadikan modal dasar bagi pembinaan keagamaan melalui kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, tentunya sesuai dengan kondisi psikologis, dan sosial masyarakat.

Adapun jumlah bangunan peribadatan umat Islam di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Perincian Bangunan Pribadatan Umat Islam Desa Jagaraga**  
**Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat**

No	Bagunan Pribadahan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	4
Jumlah		7

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat memiliki 3 buah masjid dan 4 buah musholla untuk bangunan pribadatan umat Islam. Untuk memajukan kegiatan keagamaan di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan pengajian-pengajian rutin ibu-ibu setiap malam senin dan minggu.

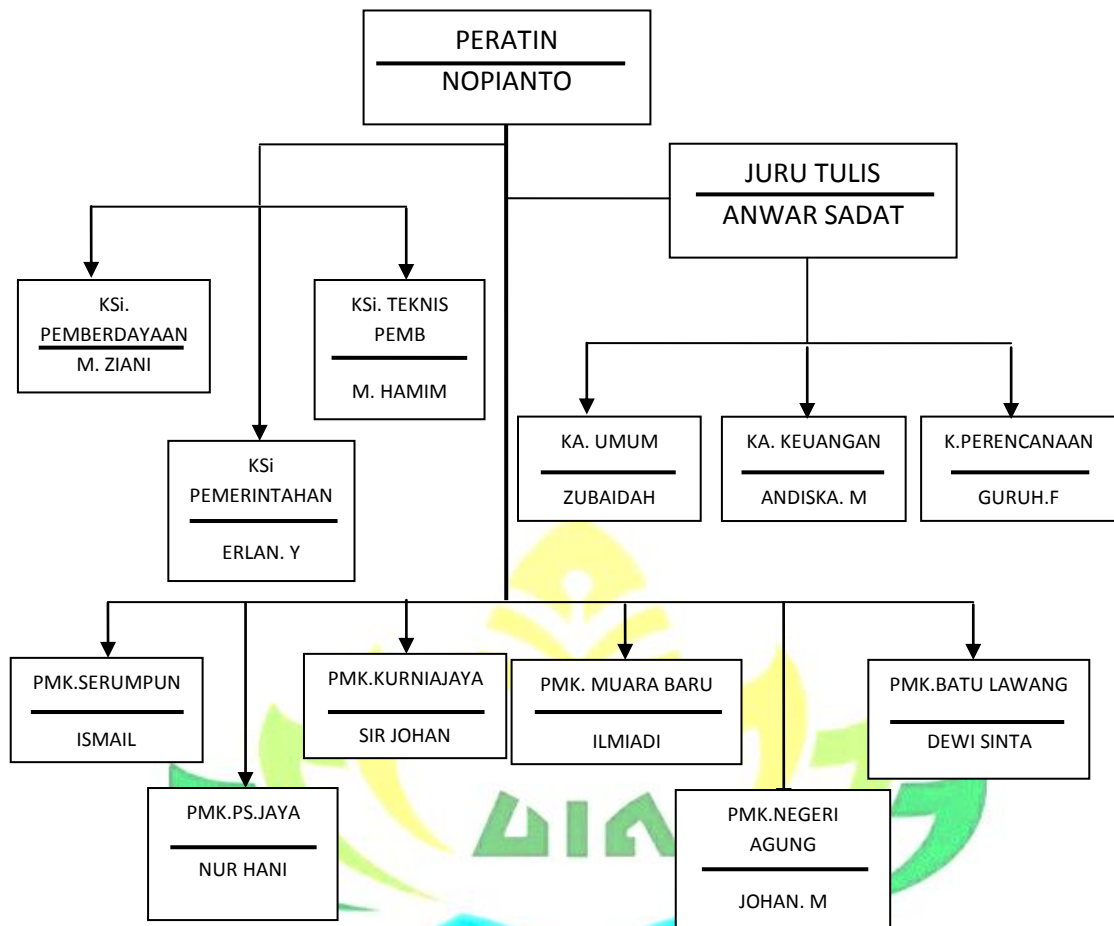
#### **d. Struktur Organisasi Desa Jagaraga**

Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi, hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja, aturan dan gambaran nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerja sama yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan landasan atau dasar kerja dimaksudkan agar mereka melaksanakan tugasnya dapat terarah dan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan juga untuk menanamkan sifat tanggung jawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi permasalahan di dalam pekerjaan mereka.

Dengan adanya pembagian tugas, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari di dalam pelaksanaan tugas dapat terjadi sehingga koordinasi antara atasan dan bawahan akan terlaksana. Penentuan tugas dan tanggung jawab ini dapat diketahui melalui struktur yang ada di organisasi, tugas dan tanggung jawab seseorang pekerja dapat dilihat dari struktur yang ada yang telah ditentukan oleh badan organisasi tersebut, selain itu didasarkan atas kemampuan para pekerja itu sendiri.

Adapun organisasi Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung

Barat, yaitu:



## B. Cara Pelaksanaan Berburu di Desa Jagaraga

Pelaksanaan di lapangan sendiri para pemburu melakukan pemburuan dengan niat untuk berburu hewan yang merusak tanaman seperti babi dan kadang pula mereka berburu untuk makan seperti kijang dan rusa. Cara berburu yang dilakukan oleh penduduk desa Jagaraga adalah dengan menggunakan alat berburu pada umumnya yaitu tombak, senapan, dan juga menggunakan anjing pemburu yang sudah mereka latih. Mereka berburu secara berkelompok dan biasanya mereka berburu pada hari Jumat dan malam hari. Pada malam hari

mereka berburu binatang buruan mengandalkan cahaya bulan dan alat penerang (senter).

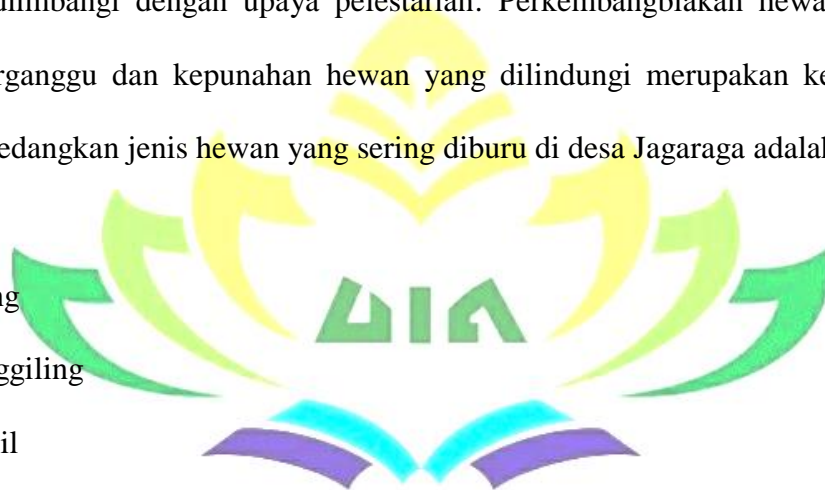
Mereka berburu di tempat berburu yang mereka jelajahi, biasanya di kebun-kebun milik warga dan tidak jarang juga mereka berburu di hutan kaki gunung seminum yang dekat dengan wilayah desa Jagaraga.

### **C. Jenis Hewan yang di Buru di Desa Jagaraga**

Banyak sekali hewan yang diburu untuk diambil bagian tubuhnya untuk diperjualbelikan, kegiatan tersebut jelas mengganggu keseimbangan ekosistem. Tanpa diimbangi dengan upaya pelestarian. Perkembangan hewan jelas akan terganggu dan kepunahan hewan yang dilindungi merupakan kerugian besar. Sedangkan jenis hewan yang sering diburu di desa Jagaraga adalah

1. Rusa
2. Kijang
3. Trenggiling
4. Kancil
5. Landak
6. Burung Enggang Gading
7. Burung murray
8. Babi

Dengan daftar hewan yang sering di buru di atas adalah hewan yang dilindungi oleh negara kecuali babi.





#### **D. Jual Beli Daging Hasil Buruan di Desa Jagaraga**

Dalam bahasa Arab, berburu dikenal dengan nama *As-Said* dengan bentuk masdar *sada'* yang berarti menangkap atau mengambil sehingga dalam arti menangkap binatang liar bukan untuk diperjual belikan. Para ulama fikih sepakat dalam berpendapat jika [dasar hukum Islam](#) berburu adalah *mubah* atau diperbolehkan untuk dilakukan, akan tetapi hukumnya akan berubah menjadi haram jika dilakukan saat ibadah haji atau umrah.

Pelaksanaan jual beli daging hewan hasil buruan dilakukan oleh penduduk desa Jagaraga dengan cara ketika para pemburu telah pulang dari tempat perburuan, mereka memperjualkan daging hasil buruan mereka kepada penduduk desa Jagaraga dengan cara memberitahukan kepada pembeli dengan mendatangi tempat tinggal pembeli. Sedangkan harga daging hewan buruan tersebut di samakan dengan harga daging sapi pada saat itu.

#### **E. Pelaksanaan Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena factor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU No.05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan satwa lihat dalam Pasal 1 Ayat 7 UU No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Pada dasarnya, larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 Ayat (2) UU/5/1990 yang berbunyi:

Setiap yang dilarang untuk

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari sesuatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau barang-barang yang dibuat dari bagian –bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) adalah pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 Ayat (2) UU 5/1990).

Ada pengecualian bagi penangkapan satwa yang dilindungi tersebut, yaitu hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Selain itu, pengecualian dari larangan menangkap satwa dilindungi itu dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Membahayakan disini berarti tidak berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketentraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian.

#### **F. Pelaksanaan Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara, mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah.

Kedua : ketentuan hukum

1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan hidupnya dan didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia.

2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
3. Perlindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
  - a. Menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
  - b. Tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
  - c. Tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
  - d. Menjaga keutuhan habitat;
  - e. Mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
  - f. Mencegah konflik dengan manusia;
  - g. Menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
4. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan;
  - a. Menjaga keseimbangan ekosistem;
  - b. Menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian
  - c. Menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan;
  - d. Membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar'i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia.
7. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya haram.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014, *Tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Pelaksanaan Jual Beli Daging Hewan Buruan di Desa Jagaraga**

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa jual beli daging hewan buruan adalah perbuatan yang diperbolehkan (*mubah*) kecuali apabila ada sesuatu hal yang melarangnya. Penjual daging hewan buruan melakukan penangkapan hewan liar secara berkelompok dengan menggunakan alat perburuan dan hewan pemburu yaitu anjing yang sudah dilatih untuk berburu. Jual beli daging hewan buruan yang dilakukan penduduk desa Jagaraga adalah setelah pemburu kembali dari tempat perburuan. Mereka memperjual belikan hasil buruannya kepada mereka yang mau membeli daging hasil buruan tersebut, dan tidak jarang juga ada pembeli dari kampung lain. Sedangkan hasil buruan yang diperjual belikan biasanya daging rusa, kijang, kancil hutan yang dijual kepada pembeli. Sedangkan hasil buruan yang berupa babi hutan dijadikan makanan untuk anjing-anjing peliharaan dan ada juga yang dijual kepada orang yang beragama non muslim yang berasal dari desa lain yang biasa membelinya.

Dalam hal ini tidak sesuai dengan UU No.05 Tahun 1990 dalam pasal 21 ayat (2) seperti yang di sebutkan pada bab sebelumnya. Pelaksanaan perburuan yang kurang diperhatikan oleh aparat yang berwenang, sehingga sangat disayangkan perburuan yang dilanjutkan dengan jual beli daging hasil buruan



dan apabila dibiarkan terus-menerus hal ini akan dapat mengancam kepunahan hewan dan akan mengganggu keseimbangan ekosistem di alam.

Pelaksanaan jual beli daging hewan buruan ini sebenarnya sudah memenuhi rukun syarat jual beli yang sah, namun karena objek jual belinya adalah satwa yang dilindungi oleh negara dan larangan untuk melakukan kerusakan maka batal lah jual beli tersebut dan apabila tetap dilanjutkan maka hukumnya akan berubah menjadi haram.

## B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan

Berdasarkan dengan masalah jual beli, hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran terhadap boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli. Memang hukum Islam pada dasarnya memandang positif bahwa jual beli adalah diperbolehkan (*mubah*) dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa':29)<sup>70</sup>

Ayat tersebut memberikan dasar pengertian bahwa jual beli tetap diperbolehkan bila prosesnya melalui tata cara aturan yang dibenarkan oleh hukum Islam, yaitu tidak keluar dari koridor Islam contohnya riba, bila tidak

---

<sup>70</sup> Al Qur'an Terjemah Al-Ikhlâs, Q.S. An-Nisa' Ayat 29, hlm. 83.

sesuai dengan peraturan Islam maka jual belinya diharamkan. Dengan demikian jual beli diharapkan tidak berlangsungnya proses transaksi serah terima pihak-pihak tertentu, namun yang harus diperhatikan adalah tentang rukun dan syarat jual belinya. Karena faktor inilah yang menentukan terhadap boleh dan tidaknya serta halal atau haramnya jual beli.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa rukun jual beli seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang dibeli dan *sighat* (kalimat ijab qabul). Kemudian dari beberapa syarat yang juga harus diperhatikan seperti bersihnya barang dan dapat dimanfaatkan, yang bertindak adalah pemilik barang itu sendiri atau milik orang yang beraqad atau diberikan izin oleh pemilik, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diaqadkan ada di tangan.

Apabila tata aturan yang demikian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, maka akan terhindar adanya penyesalan di kemudian hari, jual beli yang demikian inilah yang diperkenankan dalam Islam. Berkenaan dengan jual beli daging hewan buruan yang terjadi di lapangan bahwa proses terjadinya jual beli daging hewan buruan di mana hewan buruan tersebut adalah hewan yang diantaranya adalah hewan yang dilindungi oleh negara dan dilarang dalam Islam sebagai bentuk menjaga ekosistem di alam. Namun, di dalam mengadakan kesepakatan terhadap perkara yang jelas, yang berarti antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli mengadakan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Al Qur'an ternyata telah memuat berbagai ayat tentang pentingnya pelestarian satwa (hewan) dan menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Ayat-ayat yang memuat firman Allah SWT tersebut menegaskan peran penting manusia, sebagai khalifah di bumi, untuk turut serta menyelamatkan dan melestarikan satwa-satwa (termasuk satwa langka) agar tidak punah. Dalam beberapa ayat tersebut, jelas menunjukkan pentingnya melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap hewan.

Firman Allah dalam Al Qur'an menyatakan tugas manusia sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya "Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi." mereka berkata "apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana. Sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah:30)<sup>71</sup>

Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Al Karim yang melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa langka. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al A'raf ayat 56:

---

<sup>71</sup> Al Qur'an Terjemah Al-Ikhlâs, Q.S. Al-Baqarah Ayat 30, hlm. 6.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah ke-pada Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. Al-A’raf:56)<sup>72</sup>

Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan (ihsan) antar sesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya masalah satwa langka. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An’am ayat 38:

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan Tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatupun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada tuhan mereka dikumpulkan.” (Q.S. Al-An’am:38)<sup>73</sup>

Qaidah Ushuliyyah dan Qaidah Fiqhihiyyah

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ خِلَافِهِ

Artinya: “Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya”

<sup>72</sup> Al Qur’an Terjemah Al-Ikhlâs, Q.S. Al-A’raf Ayat 56, hlm. 157.

<sup>73</sup> Al Qur’an Terjemah Al-Ikhlâs, Q.S. Al-An’am Ayat 38, hlm. 132.

## الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

*Artinya: “Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman”*

Berdasarkan berbagai ayat, hadits, serta pendapat para ulama di atas maka jual beli daging hewan buruan itu diperbolehkan kecuali ada sesuatu yang melarangnya seperti larangan berburu. Negara sudah melarang membunuh satwa yang dilindungi karena semakin langkanya hewan itu, atau hanya untuk kesenangan dan menyakiti hewan buruan tersebut. Pada hari akhir nanti (kiamat) hewan itu akan mengadu kepada Allah SWT karena kita telah menyalahkannya dan membunuhnya hanya untuk kesenangan semata. Namun mengingat risalah Islam tidak hanya mengajak umat manusia untuk beriman, beribadah, dan bermuamalah di masyarakat yang baik (berlaku ikhsan) sesuai dengan tuntunan Islam, tetapi Islam juga mengajak manusia dan sesama makhluk termasuk hewan dan lingkungan hidup, maka patut dipersoalkan dan direnungkan, apakah melakukan jual beli daging hewan buruan ini dapat dibenarkan, sebab hewan juga makhluk hidup yang mempunyai hak hidup bebas di habitatnya dan melestarikan jenisnya di dunia.

Al Qur'an juga banyak menjelaskan larangan merusak ekosistem di alam dengan cara memperjual belikan satwa liar dilindungi ataupun satwa yang terancam kepunahan, ditegaskan dengan hadits nabi untuk menyayangi binatang dan tidak berlaku dzolim terhadap sesama makhluk Allah SWT, juga pendapat para ulama yang menegaskan bahwa larangan menunjuk kepada keharaman, serta fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Ekosistem, maka menurut penulis disini sudah jelas

bentuk larangan dan pengharaman dari jual beli daging hewan buruan karena mereka memburu hewan yang sudah jelas dilarang oleh negara untuk memburu dan membunuhnya sehingga dagingnya diperjual belikan. Walaupun rukun dan syarat yang sudah jelas dengan ketentuan Islam, akan tetapi objek jual belinya (*ma'qud 'alaih*) dilarang oleh pemerintah dan agama. Maka batal atau tidak sahnya jual beli tersebut dan jual beli daging hewan buruan adalah haram dalam lingkup hewan yang dilindungi oleh negara.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan jual beli daging hewan buruan dilakukan oleh pemburu tanpa pengawasan dari pemerintah yang berwenang sehingga akan berdampak pada punahnya suatu binatang jika dilakukan terus menerus. Dalam hal ini harus ada kesadaran dari masyarakat dengan dilakukannya penyuluhan tentang larangan berburu hewan terutama hewan yang sudah ditetapkan oleh negara untuk tidak menangkap ataupun membunuhnya karena akan merusak ekosistem di alam.
2. Pelaksanaan jual beli daging hewan buruan di Desa Jagaraga, pada kenyataannya Islam melarang adanya jual beli satwa yang dilindungi karena akan merusak ekosistem di alam. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Hadist, ketetapan para Ulama, Fatwa MUI No.04 tahun 2014 dan UU No.05 tahun 1990 di Indonesia yang menjelaskan dan menegaskan larangan tersebut. Dengan demikian jual beli daging hewan buruan juga dilarang untuk diperjual belikan dan hukumnya adalah haram. Adapun hewan yang tidak termasuk dalam satwa yang dilindungi harus ada kejelasan bagaimana mendapatkannya.



## **B. Saran**

1. Bagi pemburu haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berburu, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam dan apakah hewan yang sedang mereka buru adalah hewan yang tidak dilindungi Negara atau tidak. Apabila hewan tersebut adalah hewan yang dilindungi oleh Negara mereka tidak harus memburunya karena apabila hewan tersebut mereka dapatkan maka dagingnya pun haram untuk dimakan ataupun diperjualbelikan, hal itu juga dapat merusak ekosistem di alam bila dilakukan secara berlebihan.
2. Bagi aparat hukum agar dapat mengawasi dan berperan aktif di masyarakat untuk meminimalisir akan punahnya hewan yang dilindungi untuk pelestarian alam serta ekosistemnya.
3. Bagi masyarakat kiranya skripsi ini dapat memberikan pemahaman ajaran-ajaran Islam terutama kegiatan jual beli daging hewan buruan ini dapat mereka ketahui hukum-hukumnya sehingga mereka dapat mempertimbangkan kembali dalam jual beli daging hewan buruan ini, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Atau bahkan dilarang dalam ajaran agama. Sehingga nantinya tidak terjadinya penyimpangan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mujieb, Mbruru Thalhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Al Qur'an terjemah Al-Ikhlas.

Alaudin Al-Kasani, *Bada' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara' i*, Juz V.

Dokumentasi Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dicatat pada tanggal 20 September 2014.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Semarang: IAIN Walisongo, 2002.

H. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

—————, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

<http://info-peternakan.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-daging-menurut-beberapa.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Daging>

Ibn Abidin, *Raad Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz IV.

Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Mahrom*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.

Ibnu Qadamah, *Al-Muqniy' ala Mukhtasar Al-Kharqiy, Ad-Dar Al-'Ilmiyyah*, Beirut, Jilid 4, 1994.

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

M. Amir Syarifudin, *Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya, 1997.

Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Mu'ammal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadits-Hadits Hukum* Jilid 6, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2015.

Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009.

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam Indonesia*, Yogyakarta: P.LKIS Printing Cemerlang, 2013.

Rachmad, Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh*, Cetakan ke 5, Jakarta: Pustaka Setia, 2015.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Ahli Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemahan Fiqh Sunnah*, IV, Bandung: Al Ma'arif, 1987.

T.M Hasbib Ash Shidiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal Fi al-Islam*, Jakarta: Mansyurat Al-Maktabah Al-Islami, 1969.

